

**PERAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI
MELALUI POLA PENYERAPAN ASPIRASI RAKYAT**

Hasanuddin

hasanuddin@gmail.com

DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRACT

The location of this research is DPRD Indragiri Hilir Regency, Riau. While the rationale for why the research location took the DPRD of Indragiri Hilir Regency, Riau as the research location, was the lack of research related to the title mentioned above which was carried out at the DPRD of Indragiri Hilir Regency, Riau, but also because of the spirit of the compilers themselves in an effort to contribute ideas for the institution to increasing its roles and functions, especially in capturing the aspirations of the people in the era of regional autonomy. The result of this research is that the pattern of absorption of community aspirations by the DPRD of Indragiri Hilir Regency is carried out in a formal and informal way. The formal method consists of recess and work visits, while the informal way is through informal visits, party activities, dialogue with NGOs and educational institutions, as well as through a cultural approach. Efforts to increase community participation in Indragiri Hilir Regency, especially related to the function of the DPRD itself, are to carry out several programs and activities that have been determined related to the function of the DPRD. The program includes: a program to improve the implementation of the budget function, a program to improve the implementation of the legislative function as well as a program to improve the supervisory function and empower community aspirations.

Keywords: *role of DPRD members, people's participation, aspirations*

ABSTRAK

Lokasi dari penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Sedangkan dasar pemikiran mengapa lokasi penelitian mengambil DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Riau sebagai lokasi penelitiannya itu kurangnya penelitian yang berkaitan dengan judul tersebut di atas yang dilakukan di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Riau, selain itu juga karena semangat penyusun sendiri dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran bagi institusi tersebut guna peningkatan peran dan fungsinya terutama dalam menjaring aspirasi masyarakat di era otonomi daerah. Hasil dari penelitian ini adalah Pola penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan cara formal dan informal. Cara formal terdiri dari reses dan kunjungan kerja sedangkan cara informal melalui kunjungan informal, kegiatan partai, dialog dengan LSM dan lembaga pendidikan, serta melalui pendekatan cultural. Upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, terutama terkait dengan fungsi DPRD itu sendiri adalah dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan fungsi DPRD. Program tersebut meliputi: program peningkatan pelaksanaan fungsi anggaran, program peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi dan juga program peningkatan fungsi pengawasan serta pemberdayaan aspirasi masyarakat.

Kata kunci: peran anggota DPRD, partisipasi dan aspirasi rakyat.

PENDAHULUAN

Era reformasi dan otonomi daerah sekarang ini diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat diberbagai sector kehidupan. Dengan adanya ekonomi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk mengelola maupun mengatur pemerintahan didaerahnya masing-masing, masyarakat setempat juga di harapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan daerahnya itu sendiri. Peran serta masyarakat setempat sangat berpengaruh sekaliter hadap laju perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintahan di tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bias memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menguatnya peran DPRD (lembagalegislatif) di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Tanggapan-tanggapan pesimis yang sebelumnya mengarah kepada institusi lembaga perwakilan ini kini menjadi pembahasan yang cukup menarik. Pergeseran peran dan fungsi lembaga legislatif di era otonomi daerah ini di tandai dengan penegasan perantugas dan wewenang DPRD, yakin selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintahdaerah juga melakukan fungsi pengawasan. Lebih tegas lagi dinyatakan dalam penjelasan umum UU No 32 Tahun

2004, bahwa DPRD harus menyatu dengan masyarakat daerah dan dipisahkan dari pemerintah daerah.

Sampai beberapa waktu yang lalu, hak untuk berpartisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, untuk memberikan suara atau untuk menduduki suatu jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan terpandang.

Salah satu tuntutan yang sering disuarakan di era reformasi dan otonomi daerah sampai sekarang ini adalah peranserta atau partisipasi masyarakat secara aktif dan nyata dalam menentukan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri. Namun pasrtisipasi itu sendiri sering tidak mendapatkan makna dan arti sebenarnya. Realita politik menunjukkan, bahwa umumnya pejabat politik sudah merasa melaksanakan kewajibannya untuk merangsang partisipasi masyarakat jika para warga negara sudah mengikuti pemungutan suara dengan tertib, ikut menghadiri rapat umum atau bersikap harmonisterhadap program-program yang direncanakan (Kumorotomo, 1996 :112)

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam penyelenggraraan pemerintahan daerah melalui para wakilnya yang berada di DPRD, lebih lanjut Azam Awang mengemukakan sebagai berikut :k edalam berperannya anggota DPRD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat pada hakikat berkenan dengan masalah hubungan antara badan tersebut dengan anggota masyarakat yang diwakili mereka secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan, sehingga secara principal setiap anggota DPRD haruslah melihat dirinya sebagai mewakili warga negara yang berada di dalam batas ruang lingkup perwakilan secara keseluruhan (Awang, 1991)

Dengan demikian kedudukan serta keberadaan lembaga perwakilan

rakyat mengundang arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif, nyata dan bertanggung jawab, seperti yang dirumuskan dalam UU No. 32 Tahun 2004, dengan kata lain bahwa DPRD merupakan lembaga yang berperan sekaligus berfungsi sebagai agen perubahan sosial.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh peran DPRD khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir Riau dengan judul penelitian "Peran anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Riau dalam membangun partisipasi melalui pola penyerapan aspirasi rakyat"

Tujuan dari penelitian ini adalah :

(1) Untuk mendeskripsikan peran anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Riau dalam membangun partisipasi melalui pola penyerapan aspirasi rakyat (2) Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Riau dalam membangun partisipasi melalui pola penyerapan aspirasi rakyat (3) Untuk mendeskripsikan upaya anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Riau sebagai lembaga Legislatif daerah dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam kaitannya membangun partisipasi melalui pola penyerapan aspirasi rakyat

TINJAUAN TEORETIS

Definisi Partisipasi atau Peran Serta

Sejalan dengan demokrasi politik dan demokrasi Indonesia, pendekatan pembangunan yang sesuai adalah yang berorientasi dengan mengutamakan manusia, *people oriented* atau lebih dikenal dengan pendekatan pembangunan partisipatif. Salah satu ciri masyarakat yang sedang berkembang ialah adanya kesadaran berbangsa dan bernegara yang lebih meningkat. Indikator yang dapat dilihat dari kesadaran tersebut adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan atau pemerintah. Pembangunan sebagai proses peningkatan

kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut.

Tanenbaum mendefinisikan partisipasi sebagaiberikut yaitu: keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama (Tanenbaum, 1992:52).

Dalam pembangunan partisipatif harkat dan martabat partisipasi pembangunan dihormati dan ditegakkan. Menurut Soetrisna (1995:221). Ada dua jenis partisipasi yang berkembang dalam masyarakat yaitu, pertama, adalah definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana, dalam hal ini pemerintah. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang atau tenaga dalam melaksanakan program pemerintah.

Definisi kedua, partisipasi masyarakat adalah partisipasi kerjasama yang erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Menurut definisi ini ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan pembangunan pembangunan dan juga diukur ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri untuk melestarikan dan mengembangkan hasilpembangunan ".

Selama ini secara tradisional, partisipasi lebih di identifikasikan dengan perilaku yang bersifat partisan atau politik. Partisipasi dalam hal ini dibagi

menjadi tiga, yaitu: (1) Peran serta horizontal (yaitu kegiatan politis yang melibat secara kolektif dalam upaya untuk mempengaruhi keputusan, seperti pemungutan suara, kampanye dan kegiatan kelompok kepentingan) (2) Peran serta vertical, yaitu mencakup segala kesempatan ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elite atau pejabat dan hubungan itu menguntungkan bagi kedua belah pihak (3) Peran serta administrative, yaitu kegiatan kelompok tertentu untuk keputusan administrative atau pertukaran (*exchange*) tertentuantara patron dan klien, sebagai missal keputusan para petani untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi suatu teknologi baru.

Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah partisipasi dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan partisipasinya dalam menilai suatu rencana yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menimbang suatu keputusan yang akan diambil. Selain itu partisipasi dalam pembuatan keputusan juga adalah proses dimana prioritas-prioritas rencana dipilih untuk dituangkan dalam program pembangunan itu sendiri, sehingga dengan mengikuti sertakan masyarakat serta tidak langsung mereka telah mengalami pendidikan dalam menentukan masa depannya secara demokratis.

Sedangkan partisipasi dalam pelaksanaan program adalah partisipasi dengan mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan operasional berdasarkan rencana yang telah disepakati bersama. Partisipasi dalam mengevaluasi dan mengawasi pembangunan adalah dimana masyarakat dapat ikut serta dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan dan memelihara hasil-hasil yang telah dicapai. Partisipasi ini merupakan bagian dari *social control*.

Dalam kaitannya penyelenggaraan pemerintah daerah, partisipasi diabaikan dalam konteks *social culture* yang ada dan

diletakkan dalam suatu tujuan yang lebih jelas. Partisipasi tidak mengabdikan pada partisipasi, partisipasi memiliki maksud dasar menjadi suatu instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, teribat aktif dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga pihaknya dapat menikmati manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah. Oleh karenanya pengembangan partisipasi hendaknya tidak mengubah karakter dasar dari relasi dalam komunitas masyarakat.

Dari uraian di atas, maka dalam hal ini DPRD sesungguhnya merupakan lembaga yang paling tepat dalam mewujudkan terciptanya pranata social yang berorientasi pada peningkatan partisipasi masyarakat.

Partisipasi dan Proses Pembuatan Keputusan atau Kebijakan

Salah satu unsure penting dalam gagasan desentralisasi adalah adanya keinginan yang kuat agar proses pembangunan dimasa depan, benar-benar bertumpu pada kepentingan rakyat banyak, terutama yang ada di daerah-daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tugas, hak, dan kewenangan DPRD secara formal mendapat porsi yang cukup luas. Dengan demikian, secara teoritis DPRD dapat berperan cukup luas dan penting dalam mengemban tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Namun demikian DPRD yang bekerja dalam lingkup suatu system politik untuk dapat mengutamakan atau memberikan suatu hasil yang maksimal yang berupa suatu keputusan atau kebijaksanaan yang memihak pada kepentingan rakyat maka sangat memerlukan input yang meliputi partisipasi atau aspirasi dan dukungan semua elemen masyarakat.

Friederich dalam Wahab (1992) memberikan definisi atau makna kebijaksanaan berupa tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau wewujudkan sasaran yang ditetapkan.

Sedangkan dalam sumber yang sama, Jankins mendefinisikan kebijaksanaan sebagai bentuk keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok actor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatusituasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batasan kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan yang bertujau untuk memberikan suatu kesepakatan antara pemberi dan penerima kebijakan tersebut. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu kebijaksanaan diantaranya yaitu menselaraskan antara pemberi dan penerima apakah dalam kebijakan itu saling menguntungkan atau malah sebaliknya, maka dari itu pembuatan keputusan sebaiknya disesuaikan dengan aspirasi dan juga partisipasi dari berbagai pihak.

Proses pengambilan suatu keputusan hendaknya menyesuaikan aspirasi, juga sarana yang tersedia dan mengakomodasikan berbagai tujuan serta aspirasi yang berbeda yang satu dengan yang lainya. Dengan demikian keputusan yang diambil nantinya dapat memberikan efek yang positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi yang berupa aspirasi dari berbagai pihak dapat dijadikan sebuah pertimbangan bagi seorang pengambil keputusan untuk memutuskan sebuah keputusan.

Kearifan dalam merespon dinamika perubahan social merupakan landasan bagi pemerintah guna menjalankan amanat rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang berfokus pada rakyat. Untuk itu kapasitas lembaga-lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan untuk mendorong terwujudnya *civil society*

yang utuh dan otonom pada masyarakat. Informasi-informasi yang berbentuk tuntutan maupun dukungan masuk kedalam proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan, kemudian setelah diproses maka keluarlah keputusan atau kebijakan yang merupakan output yang kemudian dikomunikasikan kepada lingkungan masyarakat sebagai umpan balik untuk memperoleh input kembali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah studi tentang DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Riau dalam membangun partisipasi masyarakat melalui pola-pola penyerapan aspirasi masyarakat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu teknik pengambilan sampel dilakukan secara selektif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat penelitan, dokumen dan informan.

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Sedangkan dasar pemikiran mengapa lokasi penelitian mengambil DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Riau sebagai lokasi penelitiannya itu kurangnya penelitian yang berkaitan dengan judul tersebut di atas yang dilakukan di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Riau, selain itu juga karena semangat penyusun sendiri dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran bagi institusi tersebut guna peningkatan peran dan fungsinya terutama dalam menjaring aspirasi masyarakat di era otonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode atau Pola Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Metode/pola penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain:

1. Secara Informal

A. Reses/Penjaringan Aspirasi

Dari tabel 4 diatas, kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat untuk dana capaiannya 92,4 % hal ini disebabkan anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) disetor kembali ke kas daerah, ini lebih dikarenakan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang berusaha untuk meminimalisir biaya yang digunakan. Lokasi kegiatan di 20 kecamatan sewilayah Indragiri Hilir. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dalam penjaringan aspirasi masyarakat sesuai dengan targetan yang di tetapkan, dimana kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat telah dilaksanakan 3 kali selama setahun, hal ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 55 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2004 pasal 58.

Penjaringan aspirasi dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh aspirasi masyarakat baik berupa masukan, keluhan, pendapat, saran, usulan dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dilingkungan sekitarnya dan Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya.

Peserta penjaringan aspirasi masyarakat ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir di masing-masing daerah pemilihannya, Hal ini dimaksudkan agar lebih memudahkan setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk berinteraksi/berkomunikasi dalam proses penjaringan itu sendiri

karena setiap anggota DPRD lebih mengerti keadaan serta kondisi masyarakat daerah pemilihannya sendiri, dengan begitu dapat diperoleh aspirasi masyarakat dengan maksimal. Untuk daerah pemilihan yang tidak terwakili di DPRD Indragiri Hilir, tetap dilakukan penjaringan aspirasi yang dilaksanakan oleh anggota DPRD yang ditunjuk.

B. Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja sangat penting dilakukan, karena dengan demikian anggota DPRD dapat secara langsung melihat/memperoleh informasi mengenai persoalan yang terjadi di daerah. Terkait dengan penjaringan aspirasi masyarakat, dapat kita ketahui dari tabel 4.5 dimana jumlah kunjungan kerja dalam daerah tahun 2019 yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir menurun 7,5 % dibandingkan jumlah kunjungan pada tahun 2014. Hal ini lebih dikarenakan oleh target agenda kunjungan kerja di luar daerah dalam propinsi dan kunjungan kerja diluar daerah luar propinsi tidak mengalami perubahan.

Selain melakukan reses/penjaringan aspirasi masyarakat dan kunjungan kerja, secara administratif penyerapan aspirasi dapat kita lihat dari kegiatan rapat yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tabel 4.6, kegiatan rapat dan keputusan yang di hasilkan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2016 ada beberapa yang mengalami penurunan jumlah rapat dan keputusan tetapi ada juga yang mengalami peningkatan. Ini berarti dalam melakukan kegiatan rapat dan keputusan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Sedangkan untuk jumlah pengaduan dan aspirasi yang masuk DPRD Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya semua ditampung dan ditindaklanjuti. Dari tabel 4.7 sebelumnya, pengaduan atau aspirasi sebanyak 45 yang masuk dan yang ditindak lanjuti 24,4 %. Adapun sisanya adalah berupa surat kaleng, sudah ditindak lanjuti oleh instansi

yang berwenang dan hanya berupatembusan, disamping itu hal ini juga bias disebabkan karena pengaduan atau aspirasi yang masuk telah ditindaklanjuti oleh instansi-instansi yang berwenang dalam persoalan tersebut. Namun pada dasarnya seluruh pengaduan ataupun aspirasi yang masuk ke DPRD telah ditindaklanjuti, asalkan benar adanya dan sesuai tugas dewan, dalam arti sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan merupakan kepentingan masyarakat banyak, seperti masalah dana bantuan desa dan lainnya, jadi setiap pengaduan yang masuk selalu di tindaklanjuti.

2. Secara Informal

A. Kunjungan Informal

Kegiatan ini kebanyakan merupakan inisiatif sendiri dari anggota DPRD. Kegiatan ini dapat juga bersifat mendadak, sehingga laporan atau data yang diserap/diterima tidak dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga belum dapat dihimpun berapa jumlah kunjungan kerja informal tersebut.

Kunjungan seperti ini juga sangat efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat, dikarenakan anggota DPRD bisa mengadakan kunjungan kapanpun ke daera-daerah tanpa harus menunggu waktu atau jadwal yang ditetapkan terlebih dahulu.

B. Melalui Kegiatan Partai

Dalam kaitanya dengan penyerapan aspirasi dari masing-masing partai, ini berarti bahwa hanya partai yang mendapatkan kursi saja yang mampu menyampaikan aspirasi tersebut. Sedangkan bagi masyarakat yang partainya tidak terwakili dalam DPRD akan kesulitan dalam penyampaian aspirasi, hal ini perlu mendapatkan perhatian.

C. Dialog dengan LSM dan Lembaga Pendidikan

Lembaga sosial masyarakat 'LSM' dan lembaga pendidikan merupakan salah satu komponen yang dapat dijadikan

partner dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian persoalan. Namun kegiatan ini juga sangat terbatas, ini karena terbatasnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada.

D. Pendekatan Kultural

Walaupun pendekatan kultural merupakan cara yang paling sederhana, namun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan lebih obyektif. Dalam hal ini pendekatan kultural ini, intensitas masing-masing anggota DPRD memang tidak dapat di ukur, tetapi sebagai pola penyerapan aspirasi sangat diharapkan intensitasnya.

Pendekatan kultural biasanya dilakukan di daerah-daerah yang memiliki tradisi dan juga adat tertentu yang masih kental, dengan cara ikut serta dalam kegiatan tradisi masyarakat setempat. Dengan demikian anggota DPRD bisa ikut merasakan kegiatan yang di alami masyarakat secara langsung, sehingga dapat memudahkan dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat.

Terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat ada beberapa kendala yang dialami oleh beberapa anggota DPRD yaitu menyangkut kondisi masyarakat secara umum dan kepedulian masyarakat, hal ini disebabkan karena minimnya tingkat pendidikan masyarakat.

Upaya DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dalam Membangun dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan fungsi DPRD itu sendiri, yaitu fungsi Anggaran, legislasi, dan pengawasan.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, tindak lanjut aspirasi masyarakat pada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan oleh komisi-komisi yang bidang tugasnya sesuai dengan bidang masalah dari aspirasi masyarakat melalui Raker komisi bersama dinas terkait.

Tindak lanjut kaitannya dengan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Indragiri Hilir, masyarakat dan akademisi diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi khususnya pada saat pembahasan Raperda, baik melalui surat maupun melakukan audiensi di DPRD atau Fraksi di DPRD. Tindak lanjut aspirasi masyarakat sering kali dijadikan sumber data atau bagian dari pandangan fraksi dalam melakukan pembahasan Raperda bersama dengan Pemda. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pasal yang ditetapkan dalam Raperda tersebut. Namun tindak lanjut tersebut tidak hanya terbatas pada persoalan yang akan diangkat dalam Raperda tapi juga pada persoalan yang berskala nasional.

Sedangkan tindak lanjut aspirasi melalui pelaksanaan fungsi anggaran, terutama dilakukan DPRD saat pembahasan RAPBD bersama Pemerintah Daerah. Masyarakat pada umumnya hanya menyampaikan harapan-harapannya seperti kemiskinan dikurangi, pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan bagi warga miskin. Sedangkan dari kalangan akademisi pada umumnya memberikan data-data yang terkait dengan kondisi riil di masyarakat.

SIMPULAN

Pola penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan cara formal dan informal. Cara formal terdiri dari reses dan kunjungan kerja sedangkan cara informal melalui kunjungan informal, kegiatan partai, dialog dengan LSM dan lembaga pendidikan, serta melalui pendekatan kultural. Dapat dinilai secara umum bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyerap, menampung, serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat sudah optimal.

Beberapa kendala yang ada antara lain adalah masyarakat yang partainya tidak terwakili dalam DPRD akan kesulitan dalam penyampaian aspirasi,

terbatasnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada, kondisi masyarakat secara umum dan kepedulian masyarakat, hal ini disebabkan karena minimnya tingkat pendidikan masyarakat. Upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, terutama terkait dengan fungsi DPRD itu sendiri adalah dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan fungsi DPRD. Yang mana program tersebut meliputi: program peningkatan pelaksanaan fungsi anggaran, program peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi dan juga program peningkatan fungsi pengawasan serta pemberdayaan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*. Pustaka Cakra. Surakarta.
- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Keb~aksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2009. *Pedoman Umum Beras Untuk Rumah tangga miskin*. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Metodologi Penelitian*. Citra Aditya. Bandung.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebyakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Siagian, Sondang. 1983. *Administrasi Pembangunan*. CV Haji Masagung. Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 1997. *Pengantar Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009.
- Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Yashin, Sulcahn. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) serta Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru*. Amanah. Surabaya.